

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 8

TAHUN 2006

“JENGKEL ORANG PAPUA
DITEMBAKIN TERUS”

Kantor Freeport
Di Kuningan
Dirusak Massa

Jakarta, RM. Jangan coba-coba ganggu fasilitas milik Amerika kalau nggak ingin menemui masalah. Kemarin, Polda Metro langsung mengusut aksi pengrusakan Kantor Freeport di Gedung Plaza 89, Kuningan, Jakarta.

Aksi pengrusakan tersebut diikuti dengan penangkapan beberapa orang pelakunya beberapa saat kemudian. Mereka kini diamankan di Mapolda Metro Jaya. “Polri menyesalkan pengrusakan tersebut, ini adalah anarkis dan

kriminal tentu akan kita tindak sesuai dengan prosedur,” tegas Wakadiv Humas Polri Brigjen Pol Anton Bachrul Alam di Mabes Polri kemarin.

Seperti diberitakan, 20 pendulang emas terlibat bentrok dengan puluhan petugas Polsek Tembapapura dan satpam (security) PT FI beberapa waktu lalu saat dilakukan penertiban. Tercatat beberapa korban jatuh dalam insiden kali ini baik dari sisi aparat maupun pendulang emas.

Akibat kericuhan kasus Freeport tersebut, sejumlah pejabat tinggi negara mengadakan pertemuan mendadak di Kantor Departemen Dalam Negeri, kemarin. Pertemuan tersebut membahas tentang penyelesaian masalah terkait penutupan PT Freeport oleh warga setempat. Hasilnya, negosiasi dan penyelesaian masalah akan diserahkan ke pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua.

Sekitar pukul 15.00 beberapa menteri tiba di kantor departemen pimpinan M Ma’ruf tersebut. Diantaranya, Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS. Selain itu pejabat tinggi

yang turut hadir adalah Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Kapolri Jenderal Sutanto, dan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto.

Sementara Jajaran Satuan Reserse Mobile (Resmob) Polda Metro Jaya, akhirnya menjadikan tersangka ke-10 mahasiswa yang tergabung dalam BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Papua.

Kuasa hukum para tersangka, Abu Pelu, dari Kepala Divisi Pembelaan Hukum Kontras mengatakan kalau penyerangan itu merupakan bentuk akumulasi kekesalan mahasiswa terhadap pemerintah karena kerap terjadi kekerasan di Papua.

“Mereka jengkel sekali karena peristiwa penembakan di Freeport, Tembapapura, Timika, Papua, beberapa waktu lalu,” ujarnya.

Menurut Abu, para mahasiswa menyerang gedung tempat PT Freeport berkantor karena mereka menuduh perusahaan asal Amerika Serikat itu jadi dalang kekerasan di Papua diantaranya yang meminta polisi di Papua menembaki warga Timika dua hari lalu. “Mereka juga menuntut penutupan PT Freeport karena sudah banyak darah yang tumpah ketika Freeport beroperasi di sana,” katanya. ■ GPG/ZIK

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

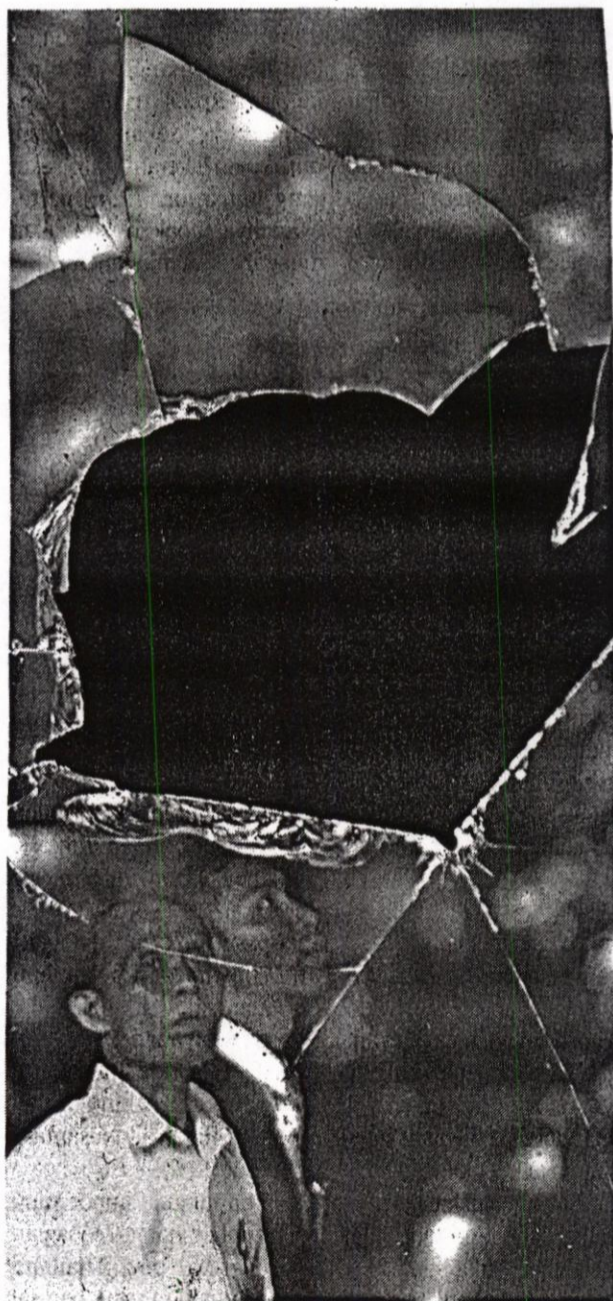
MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: T. 5

TAHUN 2006



ANTARA/SAPTONO

HANCURKAN KACA: Dua karyawan Plaza 89 memperhatikan sebuah kaca perkantoran yang pecah setelah sekelompok pemuda menghancurkan sejumlah kaca yang ditujukan ke kantor Freeport Indonesia di Jakarta, kemarin. Perusakan yang dilakukan oleh mahasiswa asal Papua itu berkaitan adanya keributan antara penambang liar dengan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, beberapa hari lalu.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPASS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN (FEB) MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 (24) 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2006

KRONIKA

Perusak Gedung Freeport ditangkap

JAKARTA: Kapolri Jenderal Pol. Sutanto menyatakan aparat menangkap 12 orang pelaku pengrusakan Plaza 89, Jakarta, tempat PT Freeport Indonesia berkantor.

"Penyerangan terjadi pada jam 03.00, ada sekitar 12-20 orang yang melakukan pengrusakan Gedung Freeport di Kuningan. Tentunya tidak dapat dibenarkan. Pelakunya ditangkap dan diperiksa ada 12 orang. Mereka orang Papua yang berada di Jakarta," tuturnya di Gedung Kepresidenan, kemarin. (BISNIS/DLE)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

● BISNIS INDONESIA
○ INVESTOR DAILY
○ KOMPAS
○ KORAN TEMPO
○ MEDIA INDONESIA
○ PIKIRAN RAKYAT
○ RAKYAT MERDEKA
○ REPUBLIKA
○ SUARA KARYA

○ SUARA PEMBARUAN
○ SINAR HARAPAN
○ TABLOID KONTAN
○ THE JAKARTA POST
○ MAJALAH GATRA
○ MAJALAH TEMPO
○ MAJALAH TRUST
○

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: B12

TAHUN 2006

Peristiwa Freeport pengaruhi harga tembaga

BLOOMBERG

SINGAPURA: Harga tembaga berjangka di Shanghai melemah karena dipengaruhi aksi penghentian produksi di kawasan tambang Grasberg milik Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang berada di Indonesia.

Freeport-McMoRan yang berbasis di New Orleans itu diketahui telah menunda produksi di Indonesia karena kalangan pengunjung rasa menutup ruas jalan menuju kawasan tambang di Provinsi Papua.

Kendati demikian, juru bicara Freeport-McMoRan Bill Collier menyatakan perusahaan masih komitmen mengirimkan tembaga termasuk emas kepada konsumen.

"Banyak orang memperkirakan penundaan produksi tak berlangsung lama, jadi ini merupakan gangguan kecil saja," kata analis metal China International Futures Cai Luoyi.

Grasberg, areal pertambangan tambang emas terbesar di dunia, itu memproduksi sekitar 660.000 ton tembaga selama 2005 atau sekitar 4% dari total produksi tembaga dunia.

Harga tembaga untuk pengiriman Mei di Shanghai Futures Exchange turun 470 yuan atau 1% menjadi 46.160

yuan (US\$5.736) per ton.

Harga tembaga untuk pengiriman segera di Changjiang, pasar spot tembaga terbesar di Shanghai, turun 300 yuan atau 0,6% menjadi 47.500 yuan per ton. Harga tersebut sudah termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 17% dan pajak impor sebesar 2%.

Sementara di London Metal Exchange, harga tembaga untuk pengiriman tiga bulan turun US\$58 atau 1,2% menjadi US\$4.900 per ton. Dua hari yang lalu harga tembaga sempat naik 0,4% dan ditutup pada posisi US\$4.958 per ton.

Sedangkan di Divisi Comex New York Mercantile Exchange harga tembaga untuk pengiriman Mei turun US\$0,023 atau 1% menjadi US\$2,2355 per pon.

Harga tembaga di New York dua hari yang lalu sempat turun seiring dengan peningkatan persediaan komoditas global hingga mencapai volume terbesar dalam 18 bulan terakhir.

Hal itu menandakan kondisi persediaan akan dapat memenuhi kebutuhan industri kabel dan pipa.

Persediaan yang dipantau oleh bursa berjangka di London, New York, dan Shanghai naik 1,5% menjadi 209.949 ton, jumlah terbanyak sejak Agustus 2004. (RRU)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input checked="" type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM	<input type="checkbox"/> DAN PANAS BUMI
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: A.3	
TAHUN 2006	

FREEPORT DITUTUP

Pemerintah Rugi Besar

Setiap hari memproduksi
250 ton konsentrat.

JAKARTA — Pemerintah diperkirakan kehilangan sekitar US\$ 3 juta (Rp 27,6 miliar) per hari selama operasi perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia terhenti. Kerugian tersebut berupa setoran pajak dan non-pajak.

Direktur Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Simon Sembiring mengungkapkan, perkiraan tersebut didasari setoran pajak dan nonpajak perusahaan tambang tembaga dan emas itu ke pemerintah pada 2005 sebesar US\$ 1,1 miliar (Rp 10,12 triliun).

Di luar pajak dan nonpajak, pemerintah masih mendapat royalti 5 persen. Simon menghitung, Freeport setiap hari memproduksi 250 ton konsentrat yang bisa menghasilkan 25 gram emas per tonnya. Dengan harga emas saat ini Rp 166 ribu per gram, setiap hari Indonesia mendapatkan royalti Rp 51,87 juta.

"Itu masih hitungan kasar, belum

memperhitungkan faktor lain, seperti rasa takut dan penurunan semangat kerja," kata Simon di Jakarta kemarin. Namun, Simon menegaskan, kerugian pasti belum diketahui karena Freeport belum tahu kapan bisa beroperasi lagi. "Kami terus memonitor."

Sejak Rabu lalu, Freeport menghentikan aktivitasnya setelah penambang tradisional menutup jalan menuju lokasi penambangan dan peburan di Tembapapura, Papua.

Penutupan itu merupakan buntut dari unjuk rasa 500 warga Timika, Kabupaten Mimika, Selasa lalu, yang berakhir dengan bentrokan. Mereka menuntut dibolehkan kembali mendulang emas di lokasi pembuangan limbah (tailing) Freeport.

Di Jayapura, sedikitnya 100 orang yang tergabung dalam Front Rakyat Papua Antimiliterisme untuk Korban Timika dan Wagete dan Solidaritas untuk Kasus Timika mendatangi gedung DPRD Papua. Mereka meminta DPRD dan Majelis Rakyat Papua membentuk panitia khusus untuk mengusut tuntas kasus-kasus yang dilakukan Freeport. Menurut mereka, Freeport telah merugikan warga

setempat selaku pemilik hak ulayat adat di kawasan perusahaan itu.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S., Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf, Kepala Kepolisian RI Sutanto, dan Panglima TNI Jenderal Djoko Suyanto kemarin melakukan pertemuan mendadak di Departemen Dalam Negeri. Pertemuan itu membahas perkembangan yang terjadi di Freeport.

Seusai pertemuan, Widodo mengatakan, masalah Freeport dengan para penambang tradisional harus diselesaikan melalui negosiasi di tingkat daerah. Proses negosiasi ini penting agar kegiatan operasional Freeport tidak terhenti. Ia juga berjanji, bila ada tindakan anarkistis di lapangan, "Hukum akan ditegakkan."

Freeport kemarin berunding dengan penambang tradisional. Namun, menurut Manajer Komunikasi Perusahaan Mindo Pangaribuan, hingga tadi malam belum dicapai kesepakatan. Masyarakat masih menutup jalan, sehingga Freeport belum bisa beroperasi.

● MUHAMMAD FASABENI | MARULI FERDINAND | CUNDING LEVI

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 4		TAHUN 2006

Freeport Stop Operasi, Penerimaan Hilang

JAKARTA, (PR).-

Penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia, diperkirakan berkurang 2,7 juta dolar AS per hari menyusul penutupan kegiatan operasi tambang akibat aksi warga setempat di dekat lokasi tambang emas dan tembaga.

Dirjen Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Departemen ESDM, Simon Sembiring mengatakan hal itu, usai mengikuti raker Pansus RUU Mineral dan Batu Bara Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Kamis (23/2).

Menurutnya, perkiraan itu didasarkan jika melihat rata-rata penerimaan negara dari Freeport yang mencapai sekira satu miliar dolar AS per tahun. "Jadi, bisa dihitung berapa kehilangan pendapatan negara dari Freeport per harinya," ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap hari Freeport memproduksi konsen-

trat mencapai 12,5 ton. Dari konsentrat itu, hasil emas mencapai 30 gram per ton dan tembaga sekira empat ton.

Penerimaan negara dari Freeport tersebut di antaranya berupa royalti, retribusi, pajak penghasilan (PPh), dan pajak pertambahan nilai (PPN). Besar royalti dihitung berdasarkan formula secara progresif yang mengikuti kecenderungan harga emas di pasar internasional.

Mengenai sampai kapan penutupan berlangsung, Menteri Purnomo mengatakan, pemerintah berharap bisa secepatnya, agar kehilangan pendapatan tidak semakin banyak.

"Saat ini, saya bersama Menko Polhukam, Kapolri, dan Panglima TNI terus melakukan langkah-langkah koordinasi penyelesaian termasuk pengamanannya, karena Freeport ini termasuk salah satu objek vital nasional," katanya.. (Ant/A-109)***

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2006

PERTAMBANGAN

Negara Rugi 2,7 Juta Dolar AS Akibat Freeport Berhenti Operasi

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah berharap kasus PT Freeport dapat segera selesai karena merugikan negara sekitar 2,7 juta dolar AS per hari. Freeport menghentikan operasi setelah warga setempat melakukan protes perlakuan pihak keamanan yang melarang penambangan warga di lokasi tailing.

"Pemerintah berharap masalah ini bisa secepatnya diselesaikan, agar kehilangan pendapatan tidak semakin banyak," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro usai raker Pansus RUU Mineral dan Batu bara Komisi VII DPR di Jakarta, Kamis (23/2).

Menurut Purnomo, pemerintah bersama aparat kepolisian akan berupaya mengamankan objek vital tersebut. Dengan usaha itu, diharapkan Freeport dapat melanjutkan produksi.

"Saat ini saya bersama Menko Polhukam, Kapolri dan Panglima TNI terus melakukan langkah-langkah koordinasi penyelesaian termasuk pengamanannya, karena Freeport ini termasuk salah satu objek vital nasional," kata Purnomo.

Sementara itu, Dirjen Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Simon Sembiring mengakui, berhentinya operasi PT Freeport akan merugikan negara sekitar

2,7 juta dolar AS. Perkiraan tersebut melihat rata-rata penerimaan negara dari Freeport yang mencapai sekitar 1 miliar dolar per tahun. "Jadi, bisa dihitung berapa kehilangan pendapatan negara dari Freeport per harinya," ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap hari, Freeport memproduksi konsentrat mencapai 12,5 ton. Dari konsentrat itu, hasil emas mencapai 30 gram per ton dan tembaga sekitar empat ton.

Penerimaan negara dari Freeport tersebut di antaranya berupa royalti, retribusi, pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Besar royalti dihitung berdasarkan formula secara progresif yang mengikuti kecenderungan harga emas di pasar internasional.

Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi juga meminta pemerintah melakukan langkah-langkah pengawasan dan pembinaan menggunakan UU yang ada yakni UU No 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.

"Seharusnya, persoalan itu tidak perlu terjadi kalau sudah ada UU Mineral dan Batu bara yang masih dibahas ini. Namun, karena UU baru belum ada, pemerintah bisa memaknai UU yang lama dulu," katanya.

Simon menambahkan, kasus Freeport tersebut merupakan masalah nasional karena menyangkut banyak pihak dan begitu kompleks.

"Hal ini terjadi juga karena banyaknya orang yang menganggur, sehingga terpaksa menjadi penambang ilegal. Kalau masyarakat sudah sejahtera, maka mereka tentu tidak mau mencuri," katanya.

Mengenai apakah kejadian ini merupakan *force majeure* (keadaan darurat), Simon mengatakan, kondisi yang terjadi saat ini belum ditetapkan sebagai *force majeure*, namun tidak menutup kemungkinan jika hal ini terus terjadi maka status tersebut bisa diberlakukan untuk menghindari penyalahgunaan kontrak dengan para pembeli.

"Menurut pemerintah, kondisi ini belum ditetapkan sebagai *force majeure*. Apakah kontrak Freeport dengan para pembeli merupakan *force majeure* atau tidak, tergantung isi perjanjian kontraknya," ujar Simon Sembiring.

(Rully)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3

TAHUN 2006

'Freeport Harusnya Tutup Sejak Dulu'

JAKARTA — Mantan Ketua MPR, Amien Rais, menganggap kasus Freeport merupakan *blessing in disguise* (berkah tersembunyi). "Sebuah kebetulan tapi Insya Allah penuh berkah," kata Amien. Menurut dia, Freeport seharusnya sudah ditutup sejak dulu.

Masyarakat Papua, kata Amien, sebenarnya sudah cukup lama memendam persoalan ini dan sekarang muncul kembali. Kejadian ini dapat menjadi titik tolak untuk memecahkan masalah Freeport demi kepentingan nasional, tanpa mengingkari konvensi internasional.

Menurut Amien, ada tiga kejahatan utama Freeport. Pertama, kejahatan ekologi akibat pembuangan limbah *tailing* Freeport yang diperkirakan telah mencapai enam miliar ton. "Sama dengan dua kali kerukan di Terusan Panama," tutur dia. Tak cuma itu, dia mencatat sekitar 240 kilometer persegi lingkungan hidup sekitar Freeport telah rusak total. Sungai Aikwa yang dipakai untuk membuang *tailing* pun tak lagi menyisakan makhluk hidup dan tinggal gengan lumpur hitam.

Kejahatan kedua adalah perpajakan. "Harus dibongkar sejauh mana Freeport telah menunggak pajak selama ini," kata Amien. Sedangkan kejahatan ketiga adalah penjarahan kekayaan alam selama puluhan tahun. Artinya, pemerintah tak pernah tahu secara pasti berapa volume konsentrat bijih tambang tembaga, emas, dan

perak yang dibawa ke luar negeri.

Sedang mantan Menko Ekuin, Kwik Kian Gie, mempertanyakan alasan Freeport melarang para penambang mengambil sisa-sisa *tailing* yang jelas-jelas tak diperlukan lagi. "Ini kan sisa, kalau *ngrampok* lain masalahnya," kata Kwik. Dia pun menduga, jang-jangan Freeport takut para penambang menemukan kandungan bahan lain dalam *tailing* .

Menurut Kwik, sejak pertama kali berdiri Freeport tak pernah melakukan pengolahan hasil galian tambang di Papua, namun justru diangkut ke luar negeri. Hal ini sangat aneh karena biaya pengangkutan lebih mahal. Wajarnya, menurut Kwik, Freeport membuat pabrik pengolahan hasil tambang di Indonesia.

Karena itu Kwik mengusulkan agar pemerintah memaksa Freeport untuk membuat pengolahan tambang di Papua. Dengan demikian Freeport tak bisa lagi menyembunyikan hasil galian/tambangnya. Cara ini menurut Kwik lebih tepat daripada memutus kontrak karya pertambangan yang berpotensi menimbulkan gugatan hukum.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Alvin Lie, mengusulkan kontrak dengan Freeport dikaji kembali agar Indonesia dapat mencapai kesepakatan yang lebih baik. Dengan kesepakatan yang lebih baik ini, kata dia, kewajiban Freeport menyeter ke negara dapat ditingkatkan secara drastis.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Siti Maemunah, bersuara lebih keras. Dia meminta pemerintah untuk segera menutup operasi Freeport secara permanen. Selama ini, menurut dia, beragam masalah di Freeport tidak pernah tersentuh pemerintah. ■ rto/c33/c40

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2006

Freeport Indonesia hentikan operasi

Kerugian negara US\$2,7 juta per hari

Oleh BAMBANG DWI DJANUARTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemerintah mengklaim negara menderita kerugian US\$2,7 juta per hari akibat penutupan operasi PT Freeport Indonesia.

Kerugian akibat kurangnya pendapatan pajak dan bukan pajak dari hasil operasi perusahaan tambang asal AS itu akan terus membengkak jika PT Freeport tidak segera beroperasi kembali.

Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Simon Felix Sembiring menegaskan dengan berhentinya operasi Freeport tentu akan mengurangi total produksi mereka sehingga akan sangat berpengaruh pada pendapatan negara.

"Pendapatan negara yang diperoleh dari PT Freeport selama setahun mencapai US\$1 miliar, kerugian per harinya tinggal hitung saja US\$1 miliar dibagi 365 hari," tuturnya usai rapat kerja dengan Pansus RUU Pertambangan, Mineral dan Batubara di

Jakarta, kemarin.

Namun penjelasan Senior Manager Corporate Communication PT Freeport Indonesia Siddharta Moersjid menyatakan angka sebesar US\$1 miliar tersebut dicapai pada 2005 saja.

"Angka tersebut bukan pendapatan negara yang diperoleh dari PT Freeport setiap tahunnya, namun hanya pada 2005 saja. Pada 2004, pajak yang dibayarkan PT Freeport kepada negara sebesar US\$260 juta," katanya ketika dikonfirmasi *Bisnis*, kemarin.

Sedangkan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakan saat ini sedang dilakukan perhitungan atas kerugian yang dialami Freeport Indonesia atas terhentinya kegiatan operasional akibat adanya pemblokiran oleh massa.

"Kita belum tahu persis kerugiannya berapa. Sekarang mereka masih

menghitungnya. Kami akan pantau terus karena ini kerugiannya cukup besar," ujar dia saat berkunjung ke Kantor Kepresidenan terkait kunjungan Menteri Luar Negeri Iran di Jakarta, kemarin.

Purnomo menambahkan hingga kemarin operasi Freeport masih tutup menunggu situasi aman. Sementara koordinasi terkait kondisi keamanan terus ditingkatkan dengan melibatkan Menko Polhukam, Panglima TNI, hingga Kapolri.

"Koordinasi ditingkatkan dalam upaya mengamankan ruas jalan di mil 72," kata dia.

Saat ini, menurut Simon, mengemukakan tim interdep pemerintah yang terdiri dari Departemen Keuangan dan Departemen ESDM tengah menghitung ulang pendapatan negara yang diperoleh dari Freeport menyusul desakan dari sejumlah kalangan untuk merevisi kontrak karya mereka.

Pendapatan yang diperoleh dari perusahaan tambang ini dinilai tidak sebanding dengan jumlah konsentrat

yang dikeruk setiap harinya dari bumi Papua.

Selain kerugian materi, Simon menyatakan juga timbul kerugian non-materi baik bagi pemerintah maupun bagi perusahaan.

Karena itu, dia menilai jika kondisi sudah aman di pertambangan yang belakangan menjadi polemik itu maka pemerintah akan meminta Freeport untuk segera beroperasi kembali.

Produksi PT Freeport Indonesia saat ini mencapai 12,5 juta ton konsentrat tembaga per tahun, termasuk di dalamnya, emas dan ikutannya.

Total kandungan emas dalam setiap ton konsentrat mencapai 30 gram dan tembaga 30%.

PT Freeport Indonesia tidak pernah mengungkapkan kandungan uranium maupun mineral ikutan lainnya dalam konsentrat tersebut.

Objek vital

Menteri Purnomo menyatakan pemerintah akan segera menggelar rapat koordinasi dengan jajaran menteri lainnya guna memulihkan keaman-

an di lokasi tambang perusahaan itu.

Sejumlah menteri terkait yang akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Menteri ESDM adalah Menko Polhukam Widodo A.S., Panglima TNI Djoko Suyanto, dan Menteri Pertahanan Juwono Sudharsono.

Menurut dia, saat ini PT Freeport sudah merupakan objek vital sehingga merupakan salah satu prioritas bagi pihak pemerintah untuk melakukan pemulihan keamanan jika terjadi gangguan.

Meski pemerintah akan segera memulihkan keamanan di sekitar jalur pertambangan mil 72-74 yang diblokir oleh masyarakat di sekitar lokasi tersebut, namun belum ada kepastian kapan Freeport akan dapat beroperasi kembali.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat [Freeport] akan berproduksi lagi. Tapi kami belum menghitung berapa kerugian. Kita pun belum dapat laporan kapan ini akan dibuka kembali, karena kami masih berkoordinasi," tegasnya. (GAJAH KUSUMO) (dwi.djanuarto@bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

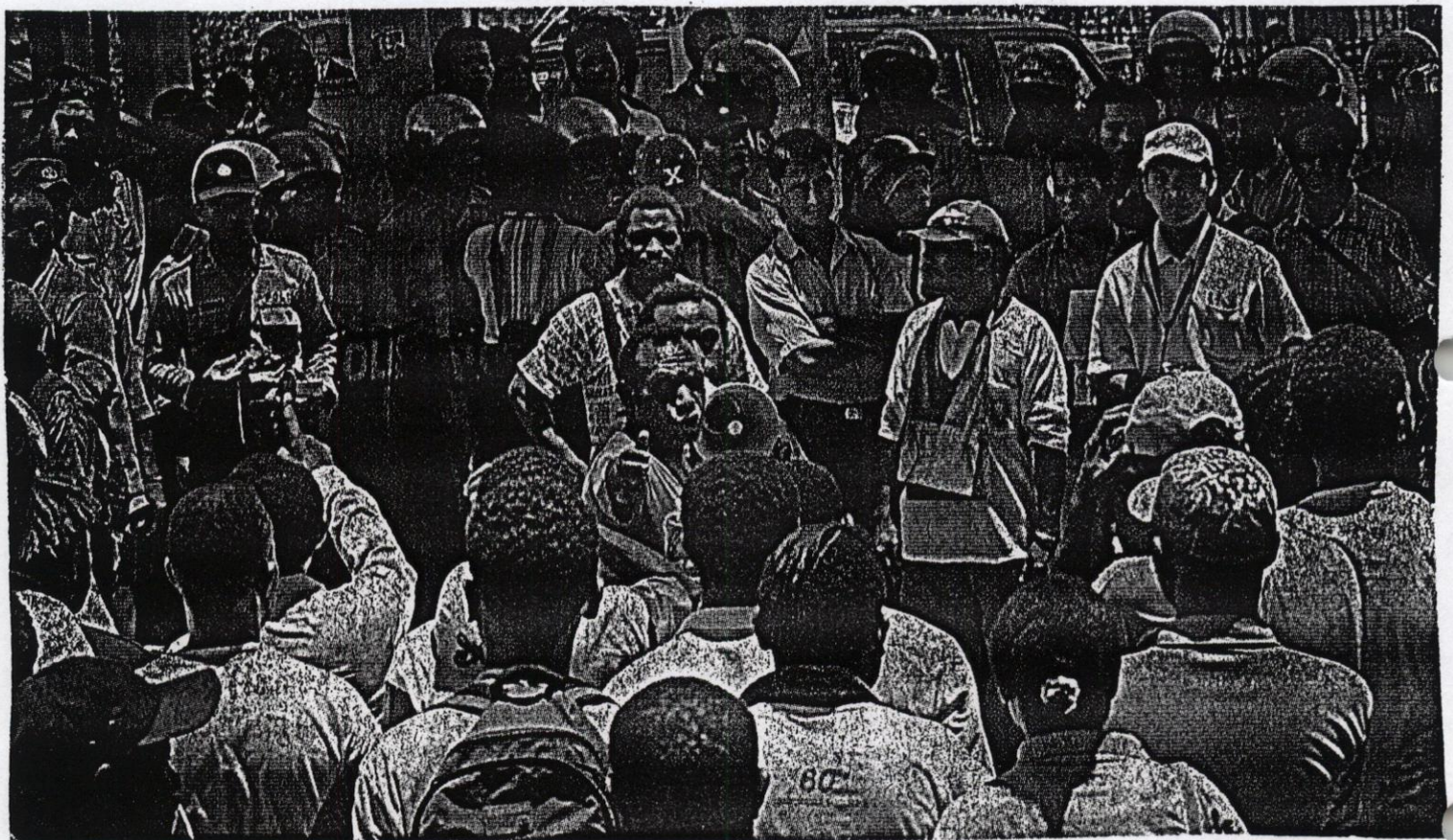
MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: |

TAHUN 2006



RUSUH:
Polisi berjaga di hadapan sekelompok mahasiswa Papua yang melakukan aksi demonstrasi, di Papua, Kamis (23/2). Aksi disertai pemblokiran menentang kekerasan yang dilakukan satuan pengamanan PT Freeport Indonesia terhadap para penambang tradisional Selasa (21/2) lalu. Akibat bentrokan tersebut Freeport menghentikan sementara produksinya.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 5

TAHUN 2006

MENYUSURI SUNGAI LIMBAH DI KAKI GUNUNG EMAS FREEPORT (9)

Membayar Militer = Sogok

TAHUN ini (2005^{red}), dana pensiun Kota New York memasukkan resolusi kepada para pemegang saham untuk meminta Freeport meninjau kembali kebijakannya membayar polisi dan militer. Menurut pemilik dana ini, kebijakan Freeport itu bisa melanggar Undang-undang Praktek Korupsi di Luar Negeri *Foreign Corrupt Practices Act*, yang melarang perusahaan-perusahaan Amerika menyogok para pejabat asing. Freeport menolak resolusi itu.

Pada tahun 2002, dana pensiun tersebut memasukkan resolusi yang mirip yang menuntut Freeport melaporkan berapa banyak yang telah dibayarkannya kepada militer. Freeport membuat masalah itu tidak masuk dalam pemungutan

suara. Dalam laporan yang dibuat kemudian kepada *Securities and Exchange Commission*, Freeport melaporkan telah membayar militer Indonesia sejumlah 4,7 juta dolar di tahun 2001, dan 5,6 juta dolar di tahun 2002. Perusahaan itu tidak menunjukkan apakah dana sebesar itu dibayar langsung ke rekening pribadi para komandan, atau untuk apa dana itu digunakan.

Dalam tanggapan yang diberikannya, Freeport menyatakan bahwa ia patuh pada Prinsip-prinsip Kesukarelaan tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia (*Voluntary Principles on Security and Human Rights*), yang adalah seperangkat pedoman yang disusun oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Mereka menyaya-

dari bahwa perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dalam ekstraksi sumber daya alam "bisa saja diharuskan atau diharapkan memberikan kontribusi, atau paling tidak mengganti, biaya yang dikeluarkan untuk melindungi fasilitas perusahaan." Prinsip-prinsip tersebut tidak menyebutkan masalah pembayaran langsung kepada para pejabat secara individual. Prinsip-prinsip itu juga tidak mensyaratkan perusahaan agar bertanggung jawab atas pembayaran-pembayaran tersebut. Freeport juga telah menyatakan bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan karena disyaratkan oleh Kontrak Karyanya - yaitu perjanjian dasar yang dibuatnya dengan pemerintah Indo-

nesia, pertama kali ditandatangani pada tahun 1967 dan diperbaharui pada tahun 1991.

Freeport menolak untuk memberikan salinan kontrak karya itu kepada *The Times*. Satu copy dokumen kontrak karya itu justru diperoleh dari Denise Leith, pengarang buku "*The Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia*." Kontrak karya dimaksud sama sekali tidak mengandung kata-kata yang mengharuskan Freeport melakukan pembayaran kepada militer. S. Prakash Sethi, pimpinan *International Center for Corporate Accountability*, yang baru-baru ini merampungkan sebuah laporan tentang kebijakan pembangunan Freeport di Papua, mengatakan bahwa perusa-

sahaan itu telah memberitahukan padanya tentang bantuan dalam bentuk non-uang (*in-kind*) yang diberikan kepada militer, yaitu untuk keperluan perumahan dan makanan.

Sethi tidak diberikan akses terhadap catatan akuntansi keuangan. Bentuk pembayaran langsung apa saja kepada militer adalah melanggar hukum, kata Sethi, ahli tanggung jawab sosial perusahaan serta profesor di Baruch College. "Itu jelas korupsi," katanya. "Itu namanya menyogok." (*Laporan investigatif wartawan New York Times Jane Perlez, Raymond Bonner dan kontributor Evelyn Rusli, Below a Mountain of Wealth, a River of Waste, 27 Desember 2005.*) ■ Bersambung

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 5		TAHUN 2006

MENYUSURI SUNGAI LIMBAH DI KAKI GUNUNG EMAS FREEPORT (8)

Marsilam: Itu Melanggar Hukum

DALAM laporan tahunannya pada tahun 2003 mengenai situasi HAM, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, para prajurit Brimob terus melakukan berbagai pelanggaran HAM serius, termasuk di dalamnya pembunuhan kilat, penyiksaan, pemerkosaan, dan penahanan tanpa proses hukum." Laporan itu tidak secara khusus mengutip kejadian-kejadian di Papua. Ada alasan lain mengapa Freeport harus memberikan perhatian ekstra?

Pada bulan Agustus 2002, tiga orang guru yang dipekerjakan oleh Freeport, termasuk di dalamnya dua orang Amerika, dibunuh dalam suatu serangan pada jalan mi-

lik perusahaan yang dipatroli oleh militer yang dibayar Freeport untuk melindungi para karyawannya. Tiga tahun kemudian, FBI masih melakukan penyelidikan, dan alasan-alasan pembunuhan itu belum terungkap. Freeport menyatakan bahwa perusahaan itu tidak bisa memberikan komentar atas investigasi yang dilakukan.

Amerika Serikat resmi menuduh seorang Papua, Anthonius Wamang, pada tahun 2004, sebagai yang bertanggung jawab. Tetapi masih diperlukan kerjasama penuh dari militer, demikian komentar beberapa pejabat Amerika. Karyawan Freeport dan para pejabat Amerika mengatakan bahwa

pembunuhan ini mungkin saja bagian dari perang 'wilayah' antara polisi dan tentara, masing-masing berjuang untuk memperoleh akses ke pembayaran Freeport.

Laporan awal yang dibuat oleh polisi Indonesia mengarah pada keterlibatan militer Indonesia, dan beberapa pejabat Freeport dan pemerintah Bush pernah mengatakan bahwa mereka mencurigai tingkatan tertentu keterlibatan militer. Laporan polisi menunjukkan, motivasi yang melatarbelakangi pembunuhan ini adalah bahwa Freeport telah mengancam untuk memotong dukungannya kepada para prajurit.

Para prajurit yang ditugaskan

di Papua memiliki "harapan-harapan yang tinggi", demikian laporan itu, tetapi belakangan, "dukungan yang mereka terima seperti kendaraan, telepon, dan sebagainya, dikurangi." Freeport menolak hampir semua permintaan untuk membuka pembayaran-pembayaran yang telah dilakukannya kepada militer. Alasan yang dikemukakan perusahaan ini adalah bahwa pembayaran-pembayaran tersebut legal, bahkan merupakan kewajiban menurut hukum Indonesia.

Marsilam Simanjuntak, Menteri Kehakiman dan kemudian diangkat menjadi Jaksa Agung pada salah satu pemerintahan pertama sesudah jatuhnya Soeharto mengatakan, merupakan pelanggaran terhadap hukum Indonesia bagi prajurit dan anggota kepolisian untuk menerima pembayaran dari suatu perusahaan. "Tentu saja itu melanggar hukum," katanya. Tetapi banyak perusahaan yang melakukan hal itu menurut Simanjuntak. Dengan demikian, pertanyaan yang lebih tepat adalah, "Apakah hal tersebut dibolehkan oleh hukum di Amerika Serikat?" (Laporan investigatif wartawan New York Times Jane Perlez, Raymond Bonner dan kontributor Evelyn Rusli, *Below a Mountain of Wealth, a River of Waste*, 27 Desember 2005.) ■ **Bersambung**

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPASS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2006

Kerugian Freeport US\$ 12 Juta per Hari

JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PT FI) ditengarai menanggung kerugian hingga US\$ 12 juta per hari akibat penutupan sementara kegiatan operasi penambangan emas dan tembaga di Papua.

Demikian dikemukakan seorang sumber kepada *Investor Daily* di Jakarta, Kamis (23/2). Humas Freeport Sidharta Mursyid saat dikonfirmasi menyatakan, masih terlalu dini untuk menghitung jumlah kerugian akibat penghentian produksi.

Di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menyatakan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan kerugian yang harus ditanggung akibat penutupan salah satu objek vital nasional ini.

"Kami sama sekali belum tahu total kerugiannya, mungkin masih dihitung berapa besar kerugiannya," ujar Purnomo usai rapat kerja pembahasan RUU Mineral dan Batu bara (Minerba) dengan Komisi VII DPR.

Bahkan, Purnomo pun belum bisa memastikan kapan operasi perusahaan emas dan tembaga asal Amerika Serikat ini bisa aktif kembali. Hingga saat ini, akunya, pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan pihak berwajib setempat.

"Kami belum dapat laporan kapan ini akan dibuka kembali, karena kami masih berkoordinasi. Bentrok kemarin itu kan dipicu oleh adanya penambangan liar," tandas dia.

Sementara itu, Dirjen Mineral Batubara dan Panasbumi Simon Sembiring menyatakan, pihaknya belum mengetahui total kerugian yang diderita Freeport. Namun, Simon mengatakan, pemerintah memperoleh sekitar US\$ 1,1 miliar berupa penerimaan pajak dan non-pajak selama 2005.

Simon menambahkan, Freeport

"Jika produksi Freeport menurun, penerimaan negara dari pajak ataupun non-pajak pun akan menurun."

● Simon Sembiring, Dirjen Mineral Batubara dan Panasbumi

setidaknya memproduksi sekitar 12,5 ribu ton konsentrat, yakni 30 gram per ton emas, dan 30% tembaga per harinya. Artinya, lanjut Simon, jika produksi Freeport menurun, penerimaan negara dari pajak ataupun non-pajak pun akan menurun.

Ketua Komisi VII DPR RI Agusman Effendi menambahkan, Freeport adalah satu kasus di sektor pertambangan yang cukup

menarik, apalagi terkait dengan pembahasan RUU Pertambangan dan Minerba.

"Kita tahu, banyak sekali usaha perorangan yang melakukan kegiatan pertambangan. Begitu pun dengan Freeport, tapi ada beberapa daerah yang harus diatur. Makanya dengan adanya RUU Minerba ini semuanya bisa lebih jelas," ujar Agusman.

Ia justru berharap, RUU ini nantinya bisa mengatur hubungan antar-orang yang melakukan kegiatan pertambangan. "Karena belum adanya UU Minerba, kita harus melakukan semua tindakan-tindakan, baik itu penyelamatan, pembinaan kepada UU yang ada," tandasnya.

Hitung Ulang

Departemen ESDM akan meminta Menteri Keuangan untuk menghitung ulang jumlah penerimaan pemerintah yang berasal dari PT Freeport Indonesia. "Yang kami lakukan sekarang adalah meminta Menteri Keuangan untuk menghitung jumlah penerimaan pemerintah dari PT Freeport Indonesia dalam lima tahun terakhir," kata Purnomo di Kantor Presiden.

Langkah itu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan *gross income* perusahaan Amerika Serikat bagi kebijakan fiskal, royalti, dan pajak. Purnomo menepis adanya dugaan bahwa penghitungan ulang itu dilakukan untuk mempertimbangkan kembali nilai bagi hasil antara pemerintah dan Freeport. (lan/nov)



HANCURKAN KACA – Dua karyawan Plaza 89 membersihkan pecahan kaca setelah sekelompok pemuda menghancurkan sejumlah kaca kantor Freeport Indonesia di Jakarta, Kamis (23/2). Pengrusakan yang dilakukan oleh mahasiswa asal Papua itu berkaitan dengan adanya perselisihan antara penambang liar dengan PT Freeport Indonesia di Timika beberapa hari lalu. Investor Daily/ANTARA/Saptono/Koz/spt/06.

67